

## ABSTRAK

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Salah satu tugas KPID Jawa Tengah adalah menjaga agar lembaga penyiaran yang ada di Jawa Tengah dalam perilaku penyiaran menaati Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran (P3SPS) yang didalamnya termuat berbagai macam aturan-aturan yang telah dibuat dan dirumuskan oleh KPI. KPID Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belum mampu melaksanakan sesuai dengan P3SPS karena dalam kenyataan masih banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran dalam beragam penyiaran yang disajikan oleh lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap lembaga penyiaran di Jawa Tengah dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap lembaga penyiaran di Jawa Tengah dan solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Jenis data adalah data sekunder, dibedakan menjadi bahan hukum yang berasal dari hukum dan ilmu pengetahuan hukum. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan metode analisis data adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap lembaga penyiaran di Jawa Tengah telah sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran (P3SPS). KPID Jateng telah melakukan tugas dan wewenangnya yang meliputi Pemberdayaan, Pengawasan, Pembinaan, Focus Group Discussion Kajian Isi Siaran, dan Pemantauan isi siaran. Hambatan yang dihadapi KPID Provinsi Jawa Tengah antara lain sumber daya manusia yang tidak mencukupi untuk memantau seluruh siaran, baik televisi maupun radio, peralatan teknis tidak mendukung untuk memantau seluruh siaran yang disiarkan di televisi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menonton siaran televisi. Solusinya memaksimalkan sumber daya manusia dalam tugas pemantauan seluruh siaran baik di televisi dan radio, mengaktifkan peralatan teknis yang ada dalam memantau seluruh siaran dan menggerakkan masyarakat dalam memilih acara di radio dan televisi.

**Kata kunci : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Media Penyiaran, Lembaga Penyiaran Provinsi Jawa Tengah**

## **ABSTRACT**

*Indonesia Broadcasting Commission (KPI) is an independent State agency that is in the Center and in the duties and authority are regulated in Act No. 32 Year 2002 about broadcasting. A KPI consists of Central Indonesia Broadcasting Commission Institute (KPI) and the Broadcasting Commission of Indonesia region (KPID) working in the area of Province-level. One of the tasks of the Central Java KPID is to keep the existing broadcasters in Central Java in the conduct of broadcasting the broadcasting code of conduct and comply with Standard Broadcast Program (P3SPS) which contained a wide range of rules that have been created and formulated by KPIS. KPID Central Java in the running tasks and authority hasn't been able to carry out in accordance with P3SPS because in fact many still found violations in diverse broadcasting presented by broadcasters in Central Java. The outline of issues raised in the study is how the implementation of the duties and authorities of the Commission's Broadcasting Area of Central Java province Indonesia against broadcasters in Central Java and what are the obstacles faced by the Broadcasting Commission Area of Central Java province Indonesia against broadcasters in Central Java and the solution.*

*Methods of juridical normative approach is used. Specification of analytical descriptive in nature. Secondary data is data types, distinguished legal material that comes from the law and the science of law. Method of data collection through the study of librarianship and the interview with the method of data analysis is qualitative analysis.*

*The results showed that the implementation of the duties and authorities of the Commission's Broadcasting Area of Central Java province Indonesia against broadcasters in Central Java has been in accordance with the code of conduct Standard Broadcasting and Broadcast Programs (P3SPS). KPID has performed duties and authority which includes empowerment, supervision, coaching, Focus Group Discussion Review the content of the broadcast, and monitoring of the content of the broadcast. Obstacles facing Central Java province KPID among others human resources insufficient to monitor the entire broadcast, radio or television, good technical equipment does not support to monitor the entire broadcast, broadcast on television and the lack of community participation in watching broadcast television. The solution is to maximize human resources in the task pamantauan the entire broadcast both on television and radio, streamline existing technical equipment in the monitoring of the entire broadcast and move the community in selecting the event on radio and television.*

**Keywords** : *Indonesia Broadcasting Commission area, broadcast Media, Broadcasters of Central Java*